



Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel

Otto Gusti Madung

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
Maumere, 86152, Flores,
Pos-el: ottomadung@gmail.com

Diajukan: 12-11-2020; **Direview:** 13-11-2020; **Diterima:** 23-11-2020; **Dipublis:** Desember, 2020
DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i2.212.127-144>

Abstract: *This article aims to introduce the basic thesis of Michael Sandel as described in the book the Tyranny of Merit about the link between the contemporary crisis of democracy and meritocracy. The crisis of democracy today is shown through the increasing wave of right-wing populism in some democratic countries in Europe and the USA. According to Michael Sandel, the crisis of democracy is caused by the policy of meritocracy launched by the liberal democracy that has marginalized the groups of the middle class and working class. Furthermore, the article argues that populist leaders such as Donald Trump succeed in capitalizing on the grievances and frustration of social groups and expressing them as a political agenda. Based on the communitarianism of Michael Sandel, this article offers a solution to strengthen the role of social solidarity and community to cope with individualism and the crisis of liberal democracy.*

Key words: *Crisis of democracy, meritocracy, liberalism, communitarianism, Michael Sandel.*

Pendahuluan

Filsuf asal Amerika Serikat dan profesor di Harvard University, Michael Sandel, pada pertengahan September 2020 menerbitkan sebuah buku berjudul *The Tyranny of Merit* atau “Tirani Meritokrasi”. Buku ini menggambarkan prinsip meritokrasi atau prestasi menghancurkan sistem demokrasi. Dalam buku ini Sandel pertama-tama berbicara tentang masyarakat Amerika Serikat yang menjadikan meritokrasi sebagai prinsip hidup sosial yang paling penting.

Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan tesis Michael Sandel tentang hubungan antara meritokrasi dan krisis demokrasi. Krisis demokrasi dewasa ini terungkap lewat fenomena populisme kanan di sejumlah negara Eropa.¹ Kemenangan populisme tersebut mencapai puncaknya ketika Donald Trump memasuki Gedung Putih dalam pemilihan umum Amerika Serikat pada tahun 2016.

¹ Bdk. Michael Sandel, “Populism, liberalism and democracy”, dalam: *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 44 (4), 2018: hlm. 353-359 <<https://doi.org/10.1177/0191453718757888>>

Menurut Michael Sandel, krisis demokrasi tersebut berakar pada prinsip meritokrasi yang melandasi relasi antarmanusia. Dalam masyarakat meritokratis, posisi sosial seseorang sangat ditentukan oleh prestasi individual. Artinya, seseorang menempati posisi sosial yang tinggi karena dia telah bekerja keras. Sedangkan yang menempati posisi sosial yang rendah, diminta untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Menurut Sandel, meritokrasi adalah sebuah kesadaran palsu (ideologi) yang diciptakan oleh demokrasi liberal dan telah menyingkirkan masyarakat kelas menengah dan buruh dari seluruh proses pembangunan. Kemarahan dan frustrasi yang dialami oleh kelompok sosial ini kemudian dimanipulasi oleh para pemimpin populis seperti Donald Trump dan mengungkapkannya dalam bentuk agenda politik anti kelompok elit.

Michael Sandel adalah salah seorang pemikir yang telah berjasa mengembangkan konsep komunitarisme. Ada dua hal pokok yang menjadi pusat perhatian Sandel. *Pertama*, ia melihat kenyataan yang memprihatinkan di mana warga negara kehilangan kontrol atas sejumlah hal yang sangat esensial menentukan hidupnya. *Kedua*, jaringan moral komunitas (*Gemeinschaften*) yang telah membentuk watak warga negara dari tingkat keluarga, komunitas dan sistem politik perlahan-lahan terkikis dan hancur dalam masyarakat modern. Michael Sandel berdasarkan fenomena di atas mendiagnosa terjadinya proses kehancuran demokrasi dan solidaritas komunitas yang berdampak pada munculnya ketidakpuasan, frustrasi dan ketakutan pada masyarakat kontemporer. Untuk mengatasi persoalan ini Sandel menggarisbawahi peran penting filsafat kehidupan publik.²

Tulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama akan dibahas tentang pengertian komunitarisme secara umum. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan tentang kritik Michael Sandel atas konsep antropologi liberal yang sangat individualistik. Pada bagian inti tulisan akan dikemukakan tesis dasar Michael Sandel tentang relasi antara krisis demokrasi liberal dan tirani meritokrasi. Seluruh uraian akan ditutup dengan sebuah kesimpulan singkat.

Komunitarisme Michael Sandel

Apa itu Komunitarisme?

Komunitarisme dapat dimengerti sebagai sebuah ikhtiar untuk menghidupkan kembali pada era postmodern ini kesadaran kolektif atau kesadaran akan hidup dalam komunitas di tengah kondisi masyarakat informasi dan yang diwarnai penjualan jasa pelayanan (*Dienstleistung*). Definisi singkat ini mengungkapkan secara kasat mata ambivalensi komunitarisme. Model-model kehidupan komunitas menawarkan kepada manusia cara-cara hidup tradisional agar merasa *at home*.

Ambruknya relasi-relasi sosial karena proses modernisasi telah mendorong lahirnya sejumlah ideologi komunitas tradisional dalam masyarakat modern seperti munculnya sosialisme pada abad ke-19. Dewasa ini komunitas (*Gemeinschaftlichkeit*) di satu sisi lahir sebagai kritik atas masyarakat liberal yang individualistik, namun di sisi lain muncul dalam wajah fundamentalisme neototalitarian. Diskursus seputar komunitarisme bergerak dalam ketegangan antara modernitas dan konservatisme seperti diuraikan di atas.³

Sebagai sebuah mazhab filsafat, komunitarisme lahir sebagai produk sekelompok pemikir Anglo-Saxon yang mengkritisi konsep kontrak sosial seperti dikembangkan John Rawls dan liberalisme pada umumnya. Perdebatan liberalisme versus komunitarisme dimulai awal tahun 80-an

² Bdk. Michael Sandel, *Democracy's Discontent. America in Search of a Public Philosophy* (Cambridge: Cambridge Press, 1996).

³ Bdk. Walter Reese-Schäfer, *Komunitarismus* (Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2001), hlm. 7.

dan berkembang begitu cepat.⁴ Komunitarisme terdiri dari macam-macam posisi berbeda, namun mereka sepakat pada beberapa hal mendasar: kaum komunitarian menggarisbawahi kekurangan filsafat sosial yang berorientasi pada liberalisme modern serta pentingnya tuntunan etis dan pandangan hidup bersama. Secara filosofis kaum komunitarian merujuk pada Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel dan Tocqueville, bukan pada pemikir klasik modern seperti Locke, Rousseau dan Kant.

Pokok pikiran liberalisme yang menjadi sasaran gugatan kaum komunitarian dapat diringkaskan sebagai berikut. Dalam liberalisme terdapat distingsi tegas antara konsep keadilan dan pandangan tentang hidup baik, legalitas dan moralitas. Tugas negara ialah menciptakan dan menjamin sistem hak atas dasar paham hak asasi manusia, mengkoordinasi ruang-ruang kebebasan individual secara maksimal berdasarkan prinsip hukum yang berlaku umum (Immanuel Kant). Pertanyaan seputar hidup baik, bukan menjadi kewenangan negara tetapi masuk dalam ranah privat, namun konsep hidup baik itu tidak pernah boleh bertentangan dengan prinsip hukum. Dengan demikian hukum membatasi kebebasan pandangan hidup baik.⁵

Komunitarisme mengajukan beberapa catatan kritis atas pandangan kaum liberal. Ada pun secara umum beberapa poin penting kritikan kaum komunitarian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:⁶ *Pertama*, kaum komunitarian menolak konsep antropologi liberal yang, demikian Michael Sandel, melihat manusia sebagai “*unencumbered self*” atau manusia tanpa komunitas. Manusia dalam pandangan kaum liberal dimengerti sebagai individu yang terisolir dan melayang-layang di ruang kosong serta ditempatkan dalam ruang-ruang hak kebebasan. Dalam kenyataannya, demikian kaum komunitarian, manusia selalu hidup dalam komunitas, tradisi dan ikatan sosial. Sebuah sistem sosial yang tidak menggubris aspek-aspek sosial ini dan hanya membatasi diri pada pemahaman tentang manusia sebagai pribadi hukum dalam ruang-ruang kebebasan, menghancurkan kodrat sosial hidup manusia dan cenderung mengantar masyarakat kepada bahaya individualisasi, atomisasi dan penghancuran nilai-nilai solidaritas. *Kedua*, bahaya atomisasi sosial dan melemahnya solidaritas dipertajam lagi dengan dominasi imperatif ekonomi. Rasionalitas ekonomi pasar terus mengikis dan memarjinalisasi dimensi etis, kultural dan religius bersama tradisi dan komunitas-komunitasnya (agama misalnya).

Ketiga, solusi apa yang ditawarkan kaum komunitarian untuk mengatasi bahaya individualisasi, ekonomisasi dan desolidarisasi (*Entsolidarisierung*)? Solusi kaum komunitarian ialah dengan menawarkan dan memperkuat komunitas-komunitas, kelompok-kelompok dan tradisi komunitarian di mana manusia dapat mengalami, mempraktikkan dan menginternalisasi identitas kultural, etos sosial, solidaritas dan makna bersama. Komunitarisme menawarkan solusi dengan mengikat kembali “*unencumbered self*” ke dalam keluarga, sanak saudara, tetangga, komunitas agama, jaringan sosial dan segala macam persekutuan sosial sampai akhirnya identitas sosial bangsa yang mampu memberikan makna hidup. Keutamaan etis untuk melawan egoisme ekonomis hanya mungkin dikembangkan melalui proses integrasi ke dalam komunitas dan tradisi komunitarian. Tanpa sikap-sikap yang dihayati dan ditradisikan secara komunitarian, sebuah masyarakat akan mengalami degradasi menjadi semata onggokan pribadi yuridis yang tak berdaya di hadapan “*despotisme*

⁴ Bdk. Stephen Cowden and Gurnam Singh, “Community cohesion, communitarianism and neoliberalism”, dalam: *Critical Social Policy*, 2017, Vol. 37 (2), hlm. 268-286 <<https://doi.org/10.1177/0261018316670252>>

⁵ Bdk. Dries Deweer, “Ricoeur and Anglo-American Political Philosophy: Liberalism, Communitarianism, and Republicanism”, dalam: *Philosophy Today*, Vol. 62, Issue 3, 2018: hlm. 803-821 <[10.5840/philtoday20181119236](https://doi.org/10.5840/philtoday20181119236)>

⁶ Bdk. Arno Anzenbacher, *Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzipien* (Paderborn. München. Wien. Zürich: Ferdinand Schöningh, 1997), hlm. 117.

administrative” (Bellah), yang kemudian berakhir pada individualisme birokratis (*Macintyre*) dan kebingungan publik yang tanpa arah (*Barber*).

Keempat, cita-cita kaum komunitarian berkait erat dengan kritik budaya. Charles Taylor dalam *Sources of the Self* berpendapat bahwa modernitas dalam wajah liberal telah melupakan akar, substansi dan sumber kehidupannya.⁷ Akar dan sumber mata air kehidupan modern dan juga sumber bagi subjek bebas atas dasar paham hak-hak asasi manusia bersifat pandangan hidup, religius dan metafisis. Hanya modernitas yang merefleksikan sumber kehidupannya dan membaharui diri lewat proses refleksi tersebut dapat menjadi pengawal dan pembela kebebasan dan martabat manusia. Meringingnya sumber mata air modernitas tersebut jelas menggoncangkan basis legitimasi bangunan kultural modern. Karena itu, keadilan dan hukum berpijak pada konsep hidup baik dan mengandaikan konsep hidup baik. Tanpa pilihan makna dan nilai hidup baik yang dihayati serta berpijak pada tradisi etis-religius dan ideologis, sistem hukum modern (hak dan keadilan) akan remuk seketika. Pentingnya konsep hidup baik dalam kehidupan manusia mendorong Taylor untuk mentematisasi konsep hidup baik sebagai persoalan publik dan bukan persoalan privat seperti pandangan kaum liberal.

Kritik Sandel atas Konsep “Unencumbered Self”

Krisis yang tengah mendera masyarakat kontemporer dirumuskan oleh Michael Sandel dalam kritiknya terhadap liberalisme. Hal ini diulas dalam bukunya berjudul “*Liberalism and the Limits of Justice*”.⁸ Dalam buku ini pertama-tama Sandel mengemukakan kritik atas konsep keadilan John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* (1971). Merujuk pada Immanuel Kant, Rawls menekankan bahwa etika politik tidak dapat berpijak pada konsep kebahagiaan (*Glück*) atau hidup baik (*gutes Leben/ good life*) sebagai prinsip dasarnya. Alasannya, konsep hidup baik atau kebahagiaan selalu bersifat partikular, kebetulan dan tidak dapat diberi pendasaran intersubjektif. Bahkan, sekalipun jika semua manusia menginginkan kebahagiaan, pandangan tentang kebahagiaan itu tetap berbeda satu dari yang lain. Tugas politik di sini adalah memungkinkan warga negara untuk mengejar kebahagiaan atau cita-cita tentang hidup baik, sehingga tidak bertabrakkan dengan kebebasan yang lain. Hal ini dirumuskan oleh Immanuel Kant sebagai berikut:

Tak seorang pun dengan caranya sendiri dapat memaksa saya untuk hidup bahagia, akan tetapi setiap orang boleh mengejar kebahagiaan pada jalan yang ia pikirkan baik, asalkan dia tidak merugikan kebebasan orang lain yang juga mengejar kebahagiaan yang mirip, yang kompatibel dengan kebebasan orang lain seturut hukum yang berlaku umum.⁹

Sejalan dengan Kant, Rawls memberi prioritas pada konsep keadilan (*justice*) di hadapan konsep hidup baik. Karena itu, menurut Rawls, hak dasar individu tak pernah boleh dikorbankan demi kepentingan umum. Di sini Rawls berseberangan dengan maksim utilitarisme yakni “*the greatest happiness of the greatest number*”. Sebaliknya Rawls menegaskan: “*Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie die Wahrheit in Gedankensystemen*” – “Keadilan adalah keutamaan utama institusi-institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran untuk sistem pemikiran”.¹⁰ Karena itu dalam kacamata Rawls, sebuah masyarakat bertindak tidak adil jika mengorbankan kebahagiaan seorang individu demi kepentingan umum. Sebab keadilan bukan hanya sekadar satu

⁷ Bdk. Charles Taylor, *Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität* (Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994).

⁸ Michael Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).

⁹ Immanuel Kant, *Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis* (1793), hg von Wilhelm Weischedel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977), hlm. 290.

¹⁰ Bdk. John Rawls, *Gerechtigkeit als Fairneß. Ein neuer Entwurf* (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003), hlm. 19.

tujuan di antara yang lain seperti halnya kebahagiaan, kemakmuran dan lain-lain. Sebaliknya, prinsip keadilan menyediakan *framework* yang mengatur kompetisi nilai-nilai dan tujuan-tujuan lainnya.¹¹

Sebelum kita melihat kritik Sandel atas teori keadilan Rawls, baiklah akan dikemukakan sejumlah tesis dasar teori keadilan John Rawls. Pertanyaan dasar yang akan dijawab dalam karya Rawls ialah: Bagaimana kita harus merumuskan prinsip-prinsip keadilan? Rawls menawarkan dua cara yakni metode *kontrak sosial* dan metode *filosofat moral*. Model kontrak sosial menuntun kita kepada konsep tentang *original position* atau posisi asali.¹² Bagi Rawls konsep posisi asali tidak bersifat *faktis-historis*, tapi *fiktif*. *Original position* tidak sama dengan “*original contract*” di mana seperti dijelaskan John Locke sejumlah orang membuat kontrak faktis-historis. Posisi asali berarti kita membayangkan situasi tanpa negara, mengkonstruksikan sebuah kondisi di mana orang-orang yang bebas dan setara berdiskusi untuk menata secara adil tatanan hidup bersama.

Konstruksi dalam posisi asali ini menghasilkan prinsip hidup bersama yang *fair*. Sebuah catatan singkat tentang term “adil”. Dalam bahasa Indonesia, *fair* berarti adil seperti juga *just*. Namun keduanya punya perbedaan mendasar; *fair* lebih berarti keadilan prosedural. Sebuah proses dikatakan adil jika tidak terjadi manipulasi. Sedangkan *just* berarti keadilan substansial. Contoh, dalam sebuah undian yang dibuat dengan sangat *fair*, bisa saja hadiah semuanya jatuh ke tangan orang-orang kaya. Sementara orang-orang miskin tidak mendapat apa-apa. Secara substansial kita dapat mengatakan itu tidak adil (*just*), tetapi secara prosedural tidak terjadi ketidakadilan.¹³

Menurut Rawls, para peserta posisi asali memiliki beberapa karakter yang diidealisasikan yakni memiliki rasionalitas strategis, absennya rasa empati dan iri hati satu sama lain, sehat secara jasmani dan rohani, memiliki *interes* akan makna keadilan dan mengembangkan konsepnya sendiri tentang kebahagiaan. Para anggota dalam posisi asali memiliki pemahaman tertentu tentang norma-norma dasar alternatif, antara lain konsep tentang keadilan historis seperti utilitarisme dan juga model-model baru termasuk konsep keadilan dari Rawls sendiri.

Dalam posisi asali tersebut orang mengambil keputusan di balik “cadar ketaktahuan” (*Schleier des Nichtwissens*).¹⁴ Itu berarti mereka tidak mengetahui posisi sosial dan taraf hidupnya di masa depan, jenis kelamin, identitas asalnya, kepentingan, sikap, talenta, bakat dan lain-lain. Pilihan yang harus dijatuhkan dari model-model etika yang tersedia dalam posisi asali berorientasi pada aturan dengan memilih sistem norma yang paling menguntungkan dalam kondisi paling sulit.

Menurut Sandel, pribadi yang dikonstruksi di balik *vail of ignorance* adalah pribadi yang fiktif. Di sini Rawls merancang sebuah gambaran diri yang khusus. Benar bahwa tidak diandaikan kita akan menjadi pribadi konkret seperti apa. Akan tetapi menurut Sandel, prasyaratnya ialah “satu gambaran tentang pribadi, cara bagaimana kita harus hidup jika ada makhluk yang menghayati keadilan sebagai keutamaan fundamental. Itulah gambaran tentang *unencumbered self* (pribadi yang atomistik), pribadi yang bebas dari pelbagai maksud dan tujuan”.¹⁵ Konsep tentang pribadi yang melayang-layang di ruang kosong (*the unencumbered self*) ini merupakan sasaran utama kritikan Sandel. Sebab jika konsep tentang diri yang atomistik tersebut menjadi dasar bagi pemahaman diri kita, maka hal itu berdampak pada model komunitas yang ingin kita bangun.¹⁶ Berdasarkan pandangan ini, pada dasarnya kita dapat dengan bebas memasuki sebuah komunitas, akan tetapi tidak dapat

¹¹ Michael Sandel, *Liberalism and Its Critics* (London: Oxford University Press, 1984), hlm. 21.

¹² Bdk. John Rawls, *Gerechtigkeit als, op.cit.*, hlm.132.

¹³ Bdk. K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 102

¹⁴ Bdk. John Rawls, *Eine Theorie der Gerechtigkeit* (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979/1971), hlm. 38.

¹⁵ Michael Sandel, *Liberalism and Its Crisis* (London: Oxford Press, 1984), hlm. 86.

¹⁶ *Ibid.*

memikul tanggung jawab untuk komunitas di mana kita dilahirkan tersebut seperti keluarga atau sebuah bangsa.

Di sini Sandel menemukan sebuah ambivalensi. Gambaran tentang *unencumbered self* pada tempat pertama dialami sebagai sebuah emansipasi dari tekanan alam dan paksaan peran sosial. Sebab orang dapat mengambil keputusan bebas untuk melepaskan diri dari ikatan keluarga, kampung halaman atau negara. Individu sungguh menemukan dirinya sebagai subjek yang otonom. Dalam perspektif ini ikatan-ikatan tradisi dipandang sebagai kuno dan menindas. Namun, menurut Sandel, pandangan liberal seperti ini sesat secara filosofis dan berbahaya secara politis karena ia melupakan basis yang menjadi titik pijaknya.¹⁷

Persoalan akan menjadi lebih jelas jika kita merefleksikan lebih dalam konsep keadilan John Rawls. Menurut pandangan Rawls, dalam posisi asali orang akan menerima dua macam prinsip keadilan yang menjadi basis untuk pertimbangan-pertimbangan selanjutnya.¹⁸ *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan yang sejenis untuk semua orang (“First: *each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*”). Di sini Rawls menganut egalitarianisme. Kebebasan-kebebasan seperti hak berpendapat, hak untuk mengikuti hati nurani, hak berkumpul, dan sebagainya harus tersedia dengan cara yang sama untuk semua orang. Masyarakat tidak diatur dengan adil, kalau hanya satu kelompok boleh mengemukakan pendapatnya atau semua warga negara dipaksakan untuk memeluk satu agama. Kebebasan-kebebasan itu harus seluas mungkin, tetapi ada batas juga. Batas bagi kebebasan satu orang adalah kebebasan dari semua orang lain. Sama sekali tidak adil, jika saya begitu bebas, sehingga orang lain tidak bebas lagi.

Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga: a) Menguntungkan terutama orang-orang yang minimal beruntung, dan serentak juga; b) melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang *fair* (“Second: *social and economic inequalities are to be arranged so that they are both a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and b) attached to positions and offices open to all*”).

Prinsip 2 bagian a disebut prinsip perbedaan (*difference principle*). Supaya masyarakat diatur dengan adil, tidak perlu semua orang mendapat hal-hal yang sama. Dengan itu Rawls menolak egalitarianisme radikal. Boleh saja ada perbedaan dalam apa yang dibagi dalam masyarakat. Tetapi perbedaan itu harus sedemikian rupa sehingga harus menguntungkan mereka yang minimal beruntung. Misalnya, boleh dianggap adil saja, jika negara menyelenggarakan kursus keterampilan untuk orang miskin atau memberi tunjangan kepada janda dan yatim piatu, sedangkan kepada orang lain yang cukup mampu tidak diberikan apa-apa. Mengapa hal itu dianggap adil? Karena kita merumuskan prinsip ini ketika kita berada dalam posisi asali. Dengan prinsip perbedaan ini Rawls sebenarnya meletakkan landasan etis untuk *welfare state* modern.

Prinsip 2 bagian b disebut prinsip persamaan peluang yang *fair*. Adanya jabatan atau posisi penting mengakibatkan juga ketidaksamaan dalam masyarakat. Sudah dari sediakala jabatan-jabatan tinggi sangat didambakan orang bersama fasilitas dan privilese yang melekat padanya. Hal ini tidak boleh dianggap kurang adil, asalkan jabatan dan posisi itu pada prinsipnya terbuka untuk semua orang.

Sandel mengemukakan kritik atas prinsip perbedaan (*difference principle*), terutama yang berkaitan dengan keadilan distributif. Menurut prinsip ini *income* yang lebih besar dari kelas sosial

¹⁷ Bdk. Simon Choat, “Everything for Sale? Neoliberalism and the Limits of Michael Sandel’s Philosophical Critique of Markets”, dalam: *New Political Science*, Vol. 40. No. 1, 2018: hlm. 1-14 <<https://doi.org/10.1080/07393148.2017.1417192>>

¹⁸ Bdk. John Rawls, *Eine Theorie*, *op. cit.*, hlm. 77.

tinggi hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut memberikan keuntungan bagi mereka yang minimal beruntung. Jika tidak demikian, maka mereka yang berpendapatan tinggi harus bersedia menyerahkan bagian tertentu dari pendapatan tersebut lewat pembayaran pajak progresif misalnya. Namun pertanyaan dari Sandel ialah apa yang mewajibkan mereka untuk menyerahkan bagian dari pendapatan tersebut dalam bentuk pembayaran pajak progresif? Mengapa seorang *unencumbered self* harus mewajibkan dirinya untuk berbagi dengan individu atomistik lainnya? Pertanyaan-pertanyaan ini jelas menunjukkan bahwa basis etis keadilan distributif di sini tidak terletak pada pribadi yang atomistik tapi pada faktor lain. Prasyarat kesediaan berbagi (keadilan distributif) adalah adanya komunitas yang mengikat di dalamnya terjadi proses distribusi.

Titik tolak pelaksanaan *difference principle* ialah adanya kelebihan pendapatan (*income*) individual karena alasan bakat, talenta, kecantikan, dan lain-lain. Talenta alamiah seperti ini menurut Rawls bukan hasil dari prestasi individu, tetapi sesuatu yang kebetulan atau hasil lotre alamiah dan karena itu dipandang sebagai milik umum. Karena ketidaksamaan lahiriah dan bakat alamiah merupakan lotre alamiah, maka hal itu harus dikompensasi.¹⁹ Lotre alamiah itu hanya boleh memberi keuntungan lebih bagi individu bersangkutan jika hal itu menguntungkan mereka yang minimal beruntung. Seorang pemain violin atau sepak bola berbakat misalnya boleh dibayar sangat mahal karena dikagumi oleh jutaan orang. Distribusi sejumlah talenta merupakan lotre alamiah sehingga dari perspektif moral dianggap kebetulan.²⁰

Akan tetapi, tesis Rawls tentang prinsip kebetulan munculnya bakat-bakat individual dan kemudian dijadikan basis argumentasi untuk sikap moral universal, secara filosofis bermasalah. Sebab betapapun bakat dan kemampuan intelektual sangat ditentukan oleh faktor lotre alamiah, menjadi anggota dari sebuah komunitas atau *welfare state* di mana proses distribusi itu terjadi pun sama halnya. Tidak ada basis rasionalitas yang cukup untuk menjelaskan bahwa saya harus mendistribusikan sesuatu karena saya memperolehnya secara kebetulan, jika orang lain itu hanya secara kebetulan hidup dalam satu komunitas dengan saya. Bahkan dalam paradigma berpikir liberalisme, menjadi anggota dari umat manusia adalah sebuah kebetulan.²¹ Dalam antropologi atomistik liberal, penerapan prinsip perbedaan John Rawls dipandang sebagai sebuah praktik ketidakadilan.

Menurut Michael Sandel, kesediaan untuk membagi membutuhkan sebuah basis moral yang lebih kuat dari sekadar pandangan antropologi liberal yang atomistik. Pertama-tama harus dirumuskan kepada siapa kita harus berhutang budi untuk mendistribusikan *benefit* yang kita punyai. Model komunitas seperti apa yang dapat mewajibkan kita untuk berpikir dan bertindak dalam kerangka keadilan distributif. Menurut Sandel, kumpulan individu atomistik liberal tidak mungkin bertindak sosial.

Dengan demikian, kita berhadapan dengan sebuah dilema. Di satu sisi kita memandang diri kita secara liberal sebagai "*unencumbered self*", sehingga prinsip perbedaan John Rawls tidak dapat dipertahankan. Atau di sisi lain, kita melihat diri kita sebagai anggota dari sebuah "keluarga, komunitas, bangsa, masyarakat budaya, pewaris sebuah sejarah kolektif, warga dari sebuah republik".²² Keanggotaan tersebut tidak mewajibkan kita secara suka rela seperti dalam teori kontrak sosial atau secara kodrati seperti dalam teori hukum kodrat. Keanggotaan tersebut berkaitan dengan ikatan dan kewajiban yang berkelanjutan yang akhirnya mengkonstruksi dan mendefinisikan pribadi

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

²¹ Michael Sandel, *Liberalism and*, *op.cit.*, hlm. 28.

²² *Ibid.*, hlm. 90.

menjadi aku.²³ Jadi menurut Sandel, jika kita ingin mempertahankan prinsip perbedaan John Rawls, maka konsep pribadi liberal yang atomistik harus ditinggalkan. Sandel ingin mempertahankan konsep *welfare state* sambil meninggalkan basis antropologi liberal. Hal ini dirumuskan lebih lanjut oleh Michael Sandel:

Membayangkan seorang pribadi yang tidak mampu menjalin relasi sosial konstitutif, bukan berarti memikirkan seorang individu yang rasional, bebas dan ideal, melainkan sebaliknya sedang berimajinasi tentang seorang pribadi tanpa karakter, tanpa kedalaman moralitas. Sebab memiliki karakter sesungguhnya berarti mengetahui bahwa saya merangkak masuk ke dalam sejarah yang tidak berada di bawah kendaliku, namun memiliki dampak bagi pilihan-pilihan yang saya buat dan perilakuku.²⁴

Benar bahwa manusia dapat mengambil jarak dan membuat refleksi atas sejarah dirinya. Namun kita tidak dapat mengambil sudut pandang burung dan berdiri di luar sejarah. Akan tetapi etika liberal berikhtiar untuk memposisikan individu di luar jangkauan pengalaman, *beyond* pertimbangan dan refleksi. Hasilnya adalah sebuah ilusi.

Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi

Krisis Demokrasi

Kritik Sandel atas konsep *unencumbered self* adalah penolakan atas basis antropologis yang melandasi bangunan demokrasi liberal. Basis antropologis ini rapuh dan tidak mampu menciptakan solidaritas kolektif di atasnya konstruksi demokrasi dapat dibangun. Akibatnya terjadi krisis demokrasi liberal seperti yang dialami dewasa ini.

Lebih lanjut Sandel berpandangan bahwa konsep liberal tentang pribadi atau individu tidak dapat diberi pendasaran rasional. Alasannya, liberalisme menjalin relasi parasit dengan gambaran tentang komunitas yang tidak diakuinya secara formal.²⁵ Menurut Sandel, persoalan fundamental liberalisme ialah harus berpijak pada pandangan tentang komunitas (*Gemeinschaft*) yang tidak diakuinya dan bahkan dihancurkannya.²⁶ Ini berkaitan dengan pertanyaan dasar politik tentang kesatuan yang mendasari perasaan kolektif dan kewajiban atau tanggung jawab sosial. Menurut Sandel, dalam masyarakat Eropa dan Amerika cukup lama berkembang keyakinan bahwa bentuk perasaan kesatuan sebagai komunitas nasional kokoh harus didorong lewat pendidikan politik dan kegiatan-kegiatan publik lainnya. Dalam diskursus akademik di Amerika Serikat orang berbicara tentang “republik nasional” di mana *virtues of citizens* dan patriotisme memainkan peran sentral. Akan tetapi menurut Sandel, Amerika terlalu luas dan heterogen secara kultural, sehingga sulit untuk membangun kesadaran kolektif mendalam sebagai sebuah bangsa. Akibatnya, tunduk di bawah logika liberalisme, konsep tentang tujuan bersama dan kebaikan kolektif diganti dengan “prosedur yang *fair*”. Di sini negara dimengerti sebagai “*procedural republic*”.²⁷

Dalam republik prosedural, kebebasan dipahami sebagai antitesis dari demokrasi. Kebebasan dilihat sebagai perisai pelindung individu dari kemungkinan gempuran mayoritas.²⁸ Hal ini berseberangan dengan pandangan republikanisme tradisional. Dalam republikanisme tradisional

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Axel Honneth (Hg.), *Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften* (Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1993).

²⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

kebebasan dihayati sebagai musyawarah dan aksi bersama warga. Namun lewat proses modernisasi dan sentralisasi institusi demokrasi (partai dan parlemen), kekuasaan terkonsentrasi pada lembaga-lembaga seperti birokrasi dan pengadilan yang sengaja diciptakan untuk mendistribusikan dan melindungi hak-hak individual.²⁹ Namun di sisi lain pada saat yang sama *welfare state* menuntut keterlibatan dan komitmen warga negara untuk meringankan beban finansial satu sama lain. Satu konsep tentang diri yang pada akhirnya berlandaskan pada *hak* individual, tidak cukup untuk memberikan basis legitimasi untuk tuntutan komitmen dan keterlibatan warga dalam *welfare state* di atas. Persoalan ini menurut Sandel bermuara pada perasaan ketakberdayaan warga negara di hadapan raksasa birokrasi atau *big government*. Benar bahwa hak-hak individu diperkuat lewat proses pemilihan umum dan lembaga peradilan termasuk mahkamah konstitusi. Akan tetapi perasaan ketakberdayaan warga tetap saja ada. Negara terkesan semakin *omni potent*, namun di sisi lain tidak berdaya berhadapan dengan kekuasaan korporasi.

Menurut Sandel, *unencumbered self* dari teori liberal telah menjadi kenyataan. Namun dia tidak tampil sebagai individu yang bebas, melainkan sebagai figur yang telah dilucuti otonominya, terperangkap dalam jaringan kewajiban dan sistem tanpa keputusan bebasnya. Di samping itu dalam politik tidak ditemukan identifikasi komunitas atau identitas kolektif yang mampu menopang kehidupan individu.

Dilema emansipasi individu di satu sisi dan pelucutan otonomi warga negara yang diakibatkan oleh proses emansipasi tersebut terungkap dalam ketakberdayaan warga negara di hadapan birokrasi raksasa negara. Hal ini telah mendatangkan krisis demokrasi yang ditandai dengan menguatnya gelombang populisme kanan seperti diilustrasikan oleh fenomena *Brexit* dan bertahannya Donald Trump hingga akhir masa jabatannya. Warga negara yang terpinggirkan dan dibuat tidak berdaya dalam proses demokrasi liberal akhirnya menemukan jawaban akan kekecewaannya dalam retorika anti elitis para pemimpin populis. Akibatnya, negara-negara seperti Hungaria, Turki, Rusia dan Polandia yang pernah menjanjikan harapan bagi demokrasi perlahan-lahan berkembang menjadi otoritarian dan menampilkan wajah populisme kanan.

Kecenderungan otoritarianisme ini menjadi semakin kuat pada masa pandemi Covid-19. Dalam bahasa Jerman terdapat adagium berikut: “*Die Stunde der Krise kann auch eine Stunde der Autoritären werden*” - “Masa krisis dapat menjadi momentum emas bagi para diktator”. Adagium ini tampaknya sedang mangancam tatanan politik global. Pada tingkat global, sejumlah negara menjadikan krisis pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk mengumumkan *state of emergency* (kondisi darurat). Perdana Menteri Hungaria Victor Orban misalnya pada tanggal 30 Maret 2020 mengeluarkan *Coronavirus-Schutzgesetz* (Undang-Undang Perlindungan dari Bahaya Covid-19). Sebagian besar substansi undang-undang ini tidak berkaitan dengan penanganan pandemi, tetapi lebih memberikan legitimasi bagi Orban untuk memberlakukan kondisi darurat.³⁰

Atas dasar kondisi darurat tersebut, Victor Orban sudah mengeluarkan 115 dekrit (peraturan pemerintah) yang cenderung mengintervensi dan membatasi hak-hak sipil warga negara, kebebasan mengakses informasi dan perlindungan data pribadi. Menurut konstitusi Hungaria, setiap dekrit harus mendapat persetujuan parlemen. Akan tetapi *state of emergency* telah membatalkan persetujuan parlemen tersebut. Tentang absolutisme kekuasaan Orban, Gabor Halmai, seorang hakim Mahkamah Konstitusi Hungaria, berkata: “*Er ist der alleinige Richter seines eigenen Gesetzes*” – “Ia (Victor

²⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

³⁰ Keno Verseck, “Orban wegen Notstandsgesetz in der Kritik.” *Der Spiegel*, 8. Mai 2020.

<<https://www.spiegel.de/politik/ausland/ungarn-viktor-orban-nutzt-offenbar-notstandsgesetz-aus-a-9bfa4127-9f98-4419-8f50-c0e45022ac52>>

Orban) adalah hakim satu-satunya atas undang-undang yang dibuatnya sendiri”.³¹ Hal ini telah mengundang reaksi keras dari para cendekiawan dan masyarakat sipil di Hungaria serta Eropa pada umumnya. Mereka berdemonstrasi menuntut kebebasan pers dan memperjuangkan demokrasi. Akan tetapi Orban menuduh para masyarakat sipil yang kritis terhadap rezimnya telah menyebarkan *fake news* dan kampanye negatif anti negara.

Ancaman serupa juga sedang terjadi di Indonesia. Menurut Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet, Indonesia adalah salah satu dari 12 negara Asia yang menggunakan isu pandemi Covid-19 untuk membungkam kebebasan berekspresi warga negara.³² Bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat pada umumnya terungkap dalam tuduhan penyebaran berita bohong atau *hoax* kepada para aktivis yang selalu mengkritisi kebijakan publik pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurut temuan Michelle Bachelet, di Indonesia selama masa pandemi terdapat 51 orang yang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan menyebarkan *fake news*.

Krisis demokrasi yang sedang melanda bangsa Indonesia seperti ditunjukkan dalam data di atas hanya memperkuat tesis sebelumnya tentang tendensi totalitarian rezim Jokowi. Seperti dikemukakan oleh Tom Power kecenderungan otoritarian dan kemerosotan kualitas demokrasi ini ditandai dengan manipulasi institusi hukum dan keamanan untuk kepentingan kekuasaan jangka pendek serta pembungkaman kelompok oposisi.³³ Seperti gelombang populisme di negara-negara lain, populisme di Indonesia yang muncul sejak pemilihan presiden tahun 2014 merupakan bentuk protes atas persoalan ketidakadilan sistematis yang tidak pernah disentuh dalam dua dekade demokrasi desentralisasi.³⁴ Ketimpangan sosial tersebut ditunjukkan lewat rasio gini yang terus memburuk. Pada tahun 2018 rasio gini di Indonesia berada pada angka 0,393. Angka ini memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai indeks gini pada Maret 2015 yakni 0,408. Akan tetapi masih lebih tinggi dari ratio gini pada akhir masa Orde Baru yakni 0,35.³⁵

Akan tetapi populisme rezim Jokowi gagal menyelesaikan persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial ini karena populisme telah dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan semata.³⁶ Akibatnya populisme di Indonesia gagal menjadi kekuatan antagonis terhadap kekuasaan oligarki. Keberhasilan rezim Jokowi untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat revisi Undang-Undang KPK serta pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) tanpa keterlibatan publik memperkuat tesis tentang kendali oligarki dalam proses politik di Indonesia. Kegagalan tersebut diperparah oleh sebuah proses demokratisasi tanpa tradisi liberalisme (perjuangan untuk hak-hak individu) dan gerakan kiri yang mengedepankan agenda keadilan sosial.³⁷ Akibatnya, politik di Indonesia menjadi arena pertarungan pelbagai model populisme dan populisme tidak memiliki daya emansipatoris, tetapi diinstrumentalisasi untuk melanggengkan kekuasaan oligarki.

Penjinakan populisme di Indonesia sebagai kekuatan antagonis emansipatoris juga ditunjukkan lewat pengusungan isu agama atau isu sektarian lainnya dalam politik elektoral. Hal ini mencapai puncaknya dalam penunjukan Ketua MUI, Kyai Ma'aruf Amin sebagai calon wakil presiden

³¹ *Ibid.*

³² Amelia Fitriani, “Di Tengah Pandemi Corona, Kebebasan Berekspressi di Indonesia Jadi Tanda Tanya.” *RMOL.ID*, 19 Juli 2020. <<https://dunia.rmol.id/read/2020/07/19/444194/di-tengah-pandemi-corona-kebebasan-berekspressi-di-indonesia-jadi-tanda-tanya>>

³³ Bdk. Thomas P. Power, “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline”, dalam: *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 54, No. 3, 2018: 307–338 <<https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>>

³⁴ Bdk. Hadiz dan Robison, “Competing populisms in post-authoritarian Indonesia, in: *International Political Science Review*, 2017, Vol. 38(4), hlm. 488-502.

³⁵ Bdk. Arif Budimanta, “Oligarki di Indonesia.” *Harian Kompas*, 3 Maret 2018, hlm. 6.

³⁶ Bdk. Otto Gusti Madung, “Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme”, *Jurnal Ledalero*, Vol. 17, No. 1, 2018: hlm. 58-76 <<http://dx.doi.org/10.31385/jl.v17i1.129.58-76>>

³⁷ Bdk. Hadiz dan Robison, *loc.cit.*

yang disandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden tahun 2019. Fenomena ini dibaca oleh banyak pihak sebagai strategi Jokowi untuk menangkis serangan kubu lawan bahwa Jokowi tidak ramah terhadap kelompok Islam. Akan tetapi bagaimanapun juga fenomena ini menunjukkan bahwa Jokowi sudah mendekati ke kelompok kanan (eksklusif) dan itu merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Sebab semua orang tahu, hukuman terhadap Ahok dengan tuduhan blasfemi berawal dari fatwa yang dikeluarkan oleh Ma'aruf Amin. Hal ini menunjukkan secara kasat mata proses menguatnya politik identitas di Indonesia.

Pada tataran global, fenomena politik identitas antara lain ditunjukkan lewat gelombang populisme yang kian mengganas. Sejumlah politisi populis siap dan telah merebut kekuasaan. Sederetan nama seperti Viktor Orban, Jaroslaw Kaczynski dan Robert Fico adalah para pemimpin populis yang telah meraih puncak kekuasaan politik di Eropa. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam figur seorang Donald Trump dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*). Menurut Michael Sandel, kemenangan Donald Trump dan pemimpin populis pada umumnya adalah simbol kegagalan demokrasi liberal yang berkuasa selama empat dekade terakhir. Demokrasi liberal yang telah berkembang menjadi liberalisme teknokratis yang menampung para profesional dan meninggalkan kaum buruh dan kelompok kelas menengah lainnya.³⁸ Liberalisme telah menciptakan krisis bagi demokrasi yang berakar pada apa yang Sandel namakan tirani meritokrasi. Topik ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

Tirani Meritokrasi

Menurut Michael Sandel krisis demokrasi kontemporer berakar pada ideologi meritokrasi. Dalam kata-kata Sandel sendiri: “*The populist backlash has been a revolt against the tyranny of merit*” - “Serangan populisme adalah pemberontakan melawan tirani meritokrasi”.³⁹ Tirani itu dialami oleh kelompok pekerja yang merasa direndahkan oleh sistem meritokrasi dan seluruh proyek politik liberal.⁴⁰ Sandel menggambarkan bagaimana prinsip meritokrasi menghancurkan sistem demokrasi. Meritokrasi adalah sebuah masyarakat yang menjadikan prestasi individu sebagai ukuran satu-satunya dalam kehidupan sosial serta memandang tinggi rendahnya status atau peringkat sosial atas dasar prestasi tersebut. Dalam masyarakat seperti ini orang yang menghasilkan banyak akan mendapat banyak, dan yang menghasilkan sedikit juga mendapat sedikit. Pertanyaannya, di manakah terdapat masyarakat yang sungguh-sungguh ditata menurut prinsip meritokrasi? Bukankah faktanya ialah bahwa di setiap masyarakat terdapat sejumlah orang kaya yang menghasilkan sedikit dan orang miskin yang menghasilkan banyak? Michael Sandel juga sadar dengan realitas ini.

Dalam karya ini Sandel ingin menunjukkan bahwa ada semacam dugaan atau ideologi dalam arti kesadaran palsu yang menyatakan seolah-olah kita hidup dalam masyarakat meritokratis atau berbasis prestasi. Ideologi ini memiliki dampak luar biasa bagi masyarakat seperti ditunjukkannya dalam analisis tentang masyarakat Amerika Serikat. Pandangan yang menyatakan bahwa prestasi individu adalah kriteria satu-satunya, bahwa prestasi sosial, pendapatan dan kesejahteraan ditentukan oleh prestasi masing-masing individu, telah menghancurkan solidaritas sosial dan menguburkan

³⁸ Michael Sandel, “Populism, Trump and the future of democracy.” *openDemocracy*, 8 May 2018. <<https://www.opendemocracy.net/en/populism-trump-and-future-of-democracy/>>

³⁹ Julian Coman, “Michael Sandel: ‘The populist backlash has been a revolt against the tyranny of merit’.” *The Guardian*, 6 September 2020 <https://www.theguardian.com/books/2020/sep/06/michael-sandel-the-populist-backlash-has-been-a-revolt-against-the-tyranny-of-merit?fbclid=IwAR3dwC5mJRR7eZbXywhZ462C1Ai253LXQxTaMz7qTCdbw-oDRFjxLC_djAI>

⁴⁰ Bdk. Stephen Cowden and Gurnam Singh, *op.cit.*, hlm. 272

mimpi tentang kesejahteraan sosial. Michael Sandel berpandangan bahwa ideologi meritokrasi pada tahun 2016 telah menghantar Donald Trump ke Gedung Putih.⁴¹

Mayoritas buruh tanpa ijazah universitas telah memilih Donald Trump pada pemilihan umum tahun 2016. Politik kebencian dan kemarahan yang diusung oleh Donald Trump telah menarik perhatian dan simpati kelompok buruh. Hal ini bisa dijelaskan lewat kondisi ekonomi mereka yang semakin buruk dalam empat dekade terakhir. Pada tahun 1971 93% dari kelompok buruh berkulit putih memiliki pekerjaan yang baik. Sementara pada tahun 2016 tinggal 80% yang memiliki lapangan pekerjaan.⁴² Di samping itu, pada tahun 2017 orang Amerika tanpa ijazah perguruan tinggi yang bekerja hanya 68%. Dari 20% yang menganggur, hanya sedikit yang memiliki optimisme untuk mencari pekerjaan. Mayoritas dari mereka sudah putus asa dan merasa bahwa ekonomi pasar global telah menghancurkan masa depan mereka. Kehilangan harapan untuk mencari lapangan pekerjaan baru ini bukan saja ungkapan patologis dari sebuah moralitas yang ambruk. Tak sedikit orang melakukan bunuh diri karena putus asa. Sandel menyebutnya "*Todesfälle aus Verzweiflung*" – "Kematian karena kehilangan harapan".⁴³

Sandel bekerja sebagai profesor pada Harvard University. Ia mengamati perkembangan sosial yang dramatis dan mengetahui dengan pasti bagaimana para mahasiswanya menggantungkan kemampuan prestasinya pada simbol "telah menamatkan studi pada *elite universities*" seperti Harvard dll. Sementara itu di sisi lain, demikian Sandel, tiket masuk ke universitas-universitas papan atas itu sangat bergantung pada kekayaan orang tua mereka. Dengan memberikan penekanan pada prestasi (*merit*) tampaklah kecenderungan umum masyarakat Amerika Serikat yang dalam empat dekade terakhir telah menjadikan prestasi sebagai episentrum gambaran dirinya. Para mahasiswa menafsirkan posisi mereka di tengah masyarakat seperti yang disuguhkan oleh *Zeitgeist* tersebut. Menurut Sandel, *Zeitgeist* itu muncul dalam wajah neoliberalisme pada masa pemerintahan Ronald Reagan pada tahun 80-an. Akan tetapi *Zeitgeist* itu baru berkembang menjadi hegemonial berkat jasa dari para petinggi partai demokrat seperti Bill dan Hilary Clinton serta Barack Obama.

Di sini Sandel menampilkan argumentasi pokoknya. Ia menunjukkan kepada para elit partai demokrat serta mengkonfrontasi mereka dengan pengetahuan baru bahwa mereka telah berjasa dan bertanggung jawab menghantar seorang presiden seperti Donald Trump ke puncak kekuasaan politik Amerika Serikat. Karena itu terlalu mudah untuk marah dan kecewa dengan Trump, tanpa merefleksikan peran partai demokrat yang telah menciptakan kondisi sosial yang memuluskan jalan bagi Donald Trump. Ketika Donald Trump memenangkan pemilu pada tahun 2016, para pakar dan politisi *mainstream* sangat terkejut dan kehilangan akal. Alasannya, mereka buta terhadap budaya elitis yang menganggap rendah kelompok buruh yang berlangsung empat dekade terakhir. Kultur ini lahir dari proyek meritokrasi yang bersifat eksklusif dan timpang serta digerakkan oleh globalisasi kapitalisme pasar.

Sandel menunjukkan sejumlah aspek ideologis dari praktik meritokrasi. *Pertama*, berkaitan dengan cara menghadapi persoalan ketimpangan sosial. Dalam kaca mata paradigma meritokrasi, penjelasan untuk persoalan ketimpangan sosial sangat sederhana, yakni karena ada orang menghasilkan banyak, dan yang lainnya sedikit. Sandel memperkuat kritiknya dengan mengangkat sejumlah pernyataan publik dari sejumlah politisi partai demokrat yang jelas-jelas mendukung ideologi meritokrasi. Hillary Clinton misalnya merelativisasi kekalahannya pada tahun 2016 dengan mengatakan bahwa dia dipilih oleh warga Amerika Serikat yang menyumbangkan 80% dari

⁴¹ Michael Sandel, *Vom Ende des Gemeinwohls. Wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreisst* (Berlin: Fischer Verlag, 2020), hlm. 10

⁴² *Ibid.*, hlm. 316

⁴³ *Ibid.*, hlm. 317

pendapatan bruto nasional.⁴⁴ Dari perspektif meritokratis penjelasan ini masuk akal, tetapi dia menghancurkan demokrasi sebab demokrasi tidak dibangun di atas prinsip prestasi melainkan *one person one vote*.

Kedua, tafsiran meritokratis atas penyebab munculnya ketimpangan sosial berdampak negatif bagi kelompok pinggiran. Tafsiran ini merendahkan dan menghina masyarakat miskin yang sudah berada pada posisi yang sangat sulit secara ekonomis. Meritokrasi berdampak negatif terhadap kelompok marginal sebab dibangun di atas ideologi: siapa yang miskin, jelas salah sendiri. Karena barang siapa bekerja keras, sudah pasti diganjar kesuksesan dalam hidup.⁴⁵ Etika kesuksesan barbarian ini merasuki seluruh ranah kehidupan: yang berada pada puncak kesuksesan layak mendapatkan itu. Demikianpun yang gagal. Mereka gagal karena belum berjuang maksimal dan tidak memiliki pendidikan universitas.⁴⁶

Ketiga, sistem pendidikan yang memperkuat ideologi meritokrasi. Sandel menunjukkan hasil pengamatannya tentang kehidupan universitas sehari-hari dan peluang di bidang pendidikan. Orang begitu yakin bahwa pendidikan merupakan solusi untuk mengatasi perangkap ketimpangan sosial. Sikap meritokratis tentang peran pendidikan ini juga ditekankan oleh sejumlah pejuang partai demokrat seperti Bill Clinton di Amerika Serikat, Tony Blair di Inggris dan Gerhard Schroeder di Jerman. Akan tetapi ironisnya, demikian Sandel, tiket masuk ke dunia pendidikan, terutama universitas, tidak ditentukan oleh prestasi individu anak didik, tetapi oleh status ekonomi orang tua. Selain itu ketika konsentrasi pada pendidikan memperkuat pandangan tentang kompetisi di bursa pasar kerja, persaingan untuk mendapatkan tempat di universitas elite pun bertambah brutal.⁴⁷

Keempat, sistem ekonomi merupakan sistem sosial yang paling dekat berkelindan dengan konsep meritokrasi. Pandangan *mainstream* mengatakan bahwa di bursa pasar kerja hanya orang berprestasi yang dapat bertahan. Di sini, Sandel mengajukan pertanyaan: apa persis yang dihasilkan oleh para bankir atau komisaris BUMN yang dibayar dengan gaji paling tinggi? Jika gaji dibayar berdasarkan prestasi (*merit*), apa persis substansi dari prestasi tersebut? Mengapa seorang perawat yang mengorbankan hidupnya untuk para pasien Covid-19 dibayar lebih rendah? Bukankah ini contoh bahwa prinsip meritokrasi tak lebih dari sebuah ideologi?

Untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas, Sandel menganjurkan sejumlah solusi. *Pertama*, Michael Sandel menganjurkan perlunya revitalisasi *public discourse*.⁴⁸ Revitalisasi diskursus publik menuntut peninjauan kembali secara kritis atas premis dasar liberalisme yakni *the principle of avoidance* (prinsip penghindaran). Guna menciptakan masyarakat yang toleran, liberalisme menempatkan keyakinan moral dan spiritual warga di ruang privat ketika mereka memasuki ruang publik. Tujuannya agar kelompok mayoritas tidak memaksakan nilai-nilai moralnya kepada kelompok minoritas serta mencegah pertarungan moral dalam politik berkembang menjadi perang antaragama. Di samping itu, prinsip penghindaran liberalisme berikhtiar untuk menciptakan basis bagi sikap respek dan toleran dalam sebuah tatanan sosial.

Akan tetapi menurut Sandel, strategi penghindaran yang dikembangkan oleh liberalisme keliru dan telah menciptakan krisis demokrasi. Prinsip netralitas negara dalam diskursus tentang konsep hidup baik (*good life*) menyebabkan liberalisme tidak mampu merespons isu-isu moral dan kultural yang telah menjadi alasan munculnya politik populisme. Liberalisme misalnya tidak dapat bicara

⁴⁴ Bdk. *Ibid.*, hlm. 189

⁴⁵ Bdk. Michael Sandel, *Ibid.*, hlm. 12

⁴⁶ Bdk. Julian Coman, *loc.cit.*

⁴⁷ Bdk. Michael Sandel, *Vom Ende des Gemeinwohls*, *op.cit.*, hlm. 15 dst.

⁴⁸ Michael Sandel, *Populism, Trump*, *loc.cit.*

tentang makna pekerjaan dan fungsi kerja untuk harga diri seseorang jika tidak masuk ke dalam perdebatan tentang kontestasi pelbagai konsep hidup baik. Atau, demikian Sandel, bagaimana liberalisme dapat bicara tentang relasi antara identitas nasional dan global jika tidak memiliki kosa kata tentang keutamaan-keutamaan yang mengungkapkan identitas tersebut serta klaim-klaim yang diciptakannya tentang kita?

Ketika liberalisme menerjemahkan makna, identitas dan tujuan menjadi pertanyaan seputar *fairness*, ia tidak mampu menangkap frustrasi dan kemarahan yang telah memicu lahirnya protes populisme. Liberalisme ketiadaan *ressources* moral, retorik dan empatik untuk memahami alienasi kultural dan degradasi yang dialami oleh kelompok buruh dan kelas menengah yang terpinggirkan dalam proses demokratisasi teknokratik. Liberalisme juga mengabaikan arogansi meritokratis kelompok elit. Frustrasi dan kemarahan ini ditangkap oleh para pemimpin populis seperti Donald Trump dan mengeskplotasinya untuk kepentingan agenda politik elektoral.

Liberalisme teknokratis yang menjauhkan diri dari perdebatan tentang konsep hidup baik telah mempermiskin diskursus di ruang publik, melumpuhkan daya kritis *ordinary citizens* dan memfasilitasi lahirnya populisme yang akhirnya mengisi ruang publik dengan wacana-wacana intoleran dan nasionalisme sempit penuh kebencian.⁴⁹ Untuk keluar dari kondisi ini menurut Sandel, politik demokrasi perlu mengalami revitalisasi dengan membangun kembali diskursus publik yang kuat secara moral. Sebuah diskursus yang tetap menaruh penghargaan pada prinsip pluralisme dengan cara menghadapi secara aktif faktum disensus moral, dan bukan menghindarinya (*principle of avoidance*). Dengan demikian politik demokrasi dapat memahami kemarahan dan frustrasi kelompok masyarakat umum dan atas dasar itu membangun sebuah politik demokrasi baru yang lebih inklusif.

Kedua, untuk keluar dari masyarakat meritokrasi, Sandel membongkar asumsi-asumsi ideologi meritokrasi yang telah mempolarisasi masyarakat atas *winner*s dan *loser*s. Pandemi Covid-19 telah mengajarkan kita untuk mengapresiasi para pekerja yang dianggap tidak terampil dan karena itu dibayar murah. Inilah momen pembaharuan untuk mengevaluasi kembali martabat kerja. Pandemi ini menyadarkan kita bahwa hidup kita sangat bergantung pada pekerja murah seperti perawat, sopir truk, para pelayan di *supermarket*, asisten rumah tangga, dan lain-lain.

Karena itu, Sandel menganjurkan perlunya reorientasi dalam memberi bobot pada perkerjaan. Setiap jenis pekerjaan harus mampu menjamin hidup manusia yang bermartabat dan mendapatkan pengakuan secara sosial. Dengan ini Sandel tidak menganjurkan model egalitarianisme radikal, melainkan perlunya sistem *universal basic income*. Hal ini merupakan basis material dan sumber bagi terciptanya ikatan sosial dan solidaritas. Penilaian dan pemberian bobot pada model-model pendapatan perlu ditinjau kembali. Tarif pajak atas kerja harus diturunkan, sementara pajak atas pasar uang harus dinaikkan.

Ulasan tentang meritokrasi dapat dihubungkan dengan dua karakter fundamental pandangan sosial *mainstream* yakni individualisme dan pasar. Meritokrasi mendewakan individu. Bukan kelompok atau komunitas (*Gemeinschaften*) menghasilkan sesuatu, melainkan individu. Individu harus diberi ruang untuk mengembangkan dirinya secara bebas dan untuk prestasinya itu, ia perlu mendapatkan imbalan secukupnya. Akan tetapi paradigma berpikir seperti ini membahayakan semua jenis ikatan sosial. Pandangan tentang prestasi tanpa batas semuanya berputar sekitar individu dan mengabaikan sumber daya sosial yang menghidupi individu tersebut. Kreativitas dan terobosan alternatif di bidang politik, ekonomi dan budaya sangat dibutuhkan guna melawan hegemoni ideologi meritokrasi. Hal ini harus dimulai dengan menisbikan posisi individu dan mencari bentuk-bentuk ikatan sosial baru yang menjamin masa depan yang lebih baik.

⁴⁹ Michael Sandel, "Populism, liberalism and democracy", *op.cit.*, hlm. 355.

Persoalan seputar pengakuan akan kerja berkelindan erat dengan tanggung jawab kita satu sama lain sebagai warga sebuah negara. Kita tidak dapat merumuskan kontribusi yang bermakna tanpa memikirkan tujuan dan arah kehidupan komunitas kita. Untuk itu dibutuhkan sebuah kesadaran kolektif, sebuah perasaan yang mewajibkan diri untuk bertanggungjawab terhadap satu sama lain sebagai warga dari sebuah komunitas. Menurut Sandel, kita harus merasa bahwa kita sedang berada “di atas perahu yang sama”.⁵⁰ Bukan sebuah rumusan seruan ritual yang baru muncul pada saat krisis pandemi Covid-19, tetapi harus menjadi gambaran dari apa yang dialami setiap hari. Sandel berpandangan, jaringan global, aliran kapital dan identitas kosmopolitik telah merenggangkan relasi kita sebagai warga negara satu sama lain, kurang bersyukur terhadap hasil kerja sesama dan tidak terbuka terhadap tuntutan solidaritas. Melemahnya ikatan solidaritas ini, demikian Sandel, adalah akar dari polarisasi penuh kebencian yang melanda dunia politik kita. Guna menciptakan kembali martabat dari setiap pekerjaan, kita perlu memperbaiki relasi sosial kita sebagai sebuah komunitas politik.⁵¹

Penutup

Tulisan ini telah menunjukkan bahwa krisis demokrasi liberal yang terperangkap dalam demokrasi teknokratis telah memicu lahirnya populisme di sejumlah negara di dunia. Menurut Michael Sandel, akar dari krisis tersebut adalah tirani meritokrasi. Meritokrasi adalah sebuah ideologi yang mendefinisikan prestasi individu sebagai kriteria satu-satunya yang menentukan status dan posisi sosial seseorang. Ideologi meritokrasi telah meminggirkan kelompok kelas buruh dan kelas menengah dari seluruh proses demokrasi. Menurut Michael Sandel, kemarahan dan frustrasi dari kelas sosial ini telah menghantar Donald Trump ke Gedung Putih pada tahun 2016 lalu.

Untuk keluar dari persoalan ini, Sandel menganjurkan agar gambaran tentang prestasi individu dinisbikan dan mengangkat sumber daya sosial dan peran komunitas yang menghidupi individu tersebut. Lebih jauh, dari perspektif komunitarian Sandel mengeritik “prinsip penghindaran” liberalisme dan menekankan urgensi perdebatan tentang konsep hidup baik di ruang publik guna menjawab tantangan populisme kanan yang telah mengisi ruang publik dengan wacana intoleran, xenophobia dan nasionalisme sempit.

Pemikiran Sandel ini relevan untuk konteks Indonesia juga. Sejak reformasi bergulir bangsa Indonesia sudah mempraktikkan demokrasi liberal. Praktik ini perlu dipadukan secara kreatif dengan paham komunitarian. Budaya hak-hak asasi manusia yang sudah masuk dalam produk hukum bangsa Indonesia harus berjalan seiring dengan nilai-nilai komunitarian yang terkandung dalam agama-agama dan budaya-budaya lokal. Sebab, secara konkret individu tak pernah hidup sebagai *unencumbered self* atau individu tanpa komunitas. Selain solidaritas komunitarian yang berasal dari agama dan kebudayaan, bangsa Indonesia juga memiliki Pancasila. Pancasila adalah *locus* kontekstualisasi konsep universal hak asasi manusia di Indonesia agar menjadi bagian dari hidup masyarakat. Pancasila juga mencegah bahaya privatisasi konsep hidup baik seperti dipraktikkan dalam masyarakat liberal.

Daftar Rujukan

Anzenbacher, Arnno. *Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzipien*. Paderborn. München. Wien. Zürich: Ferdinand Schöningh, 1997.

⁵⁰ Michael Sandel, “Was unsere Arroganz anrichtet”, *Neue Züricher Zeitung am Sonntag*, 27 September 2020, hlm. 60.

⁵¹ *Ibid.*

- Bertens, Kees. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Budimanta, Arif. "Oligarki di Indonesia." *Harian Kompas*, 3 Maret 2018.
- Coman, Julian. "Michael Sandel: 'The populist backlash has been a revolt against the tyranny of merit'." *The Guardian*, 6 September 2020. https://www.theguardian.com/books/2020/sep/06/michael-sandel-the-populist-backlash-has-been-a-revolt-against-the-tyranny-of-merit?fbclid=IwAR3dwC5mJRR7eZbXywhZ462ClAi253LXQxTaMz7qTCdbw-oDRFjxLC_djAI
- Choat, Simon. "Everything for Sale? Neoliberalism and the Limits of Michael Sandel's Philosophical Critique of Markets." *New Political Science*, Vol. 40. No. 1, 2018: 1-14. <<https://doi.org/10.1080/07393148.2017.1417192>>
- Cowden, Stephen and Gurnam Singh. "Community cohesion, communitarianism and neoliberalism." *Critical Social Policy*, Vol. 37 (2), 2017: 268-286. <<https://doi.org/10.1177/0261018316670252>>
- Deweert, Dries. "Ricoeur and Anglo-American Political Philosophy: Liberalism, Communitarianism, and Republicanism." *Philosophy Today*, Vol. 62, Issue 3, 2018: 803-821. <[10.5840/philtoday20181119236](https://doi.org/10.5840/philtoday20181119236)>
- Fitriani, Amelia. "Di Tengah Pandemi Corona, Kebebasan Berekspresi di Indonesia Jadi Tanda Tanya." *RMOL.ID*, 19 Juli 2020. <<https://dunia.rmolid/read/2020/07/19/444194/di-tengah-pandemi-corona-kebebasan-berekspresi-di-indonesia-jadi-tanda-tanya>>
- Hadiz, V. & Robison. "Competing populisms in post-authoritarian Indonesia." *International Political Science Review*, 2017, Vol. 38(4).
- Honneth, Axel (Hg.). *Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften*. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1993.
- Kant, Immanuel. *Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis* (1793), hg von Wilhelm Weischedel. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977.
- Madung, Otto Gusti. "Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme." *Jurnal Ledalero*, Vol. 17, No. 1, 2018: 58-76. <<http://dx.doi.org/10.31385/jl.v17i1.129.58-76>>
- Power, Thomas P. "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 54, No. 3, 2018: 307-338. <<https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>>
- Rawls, John. *Eine Theorie der Gerechtigkeit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979/1971.
- Rawls, John. *Gerechtigkeit als Fairneß. Ein neuer Entwurf*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003.
- Reese-Schäfer, Walter. *Kommunitarismus*. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2001.
- Sandel, Michael. *Liberalism and the Limits of Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- Sandel, Michael. *Liberalism and Its Crisis*. London: Oxford Press, 1984.

- Sandel, Michael. *Democracy's Discontent. America in Search of a Public Philosophy*. Cambridge: Cambridge Press, 1996.
- Sandel, Michael. "Populism, Trump and the future of democracy." *openDemocracy*, 8 May 2018. <https://www.opendemocracy.net/en/populism-trump-and-future-of-democracy/>
- Sandel, Michael. "Populism, liberalism and democracy." *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 44 (4), 2018: 353-359. <<https://doi.org/10.1177/0191453718757888>>
- Sandel, Michael. *Vom Ende des Gemeinwohls. Wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreisst*. Berlin: Fischer Verlag, 2020.
- Sandel, Michael. "Was unsere Arroganz anrichtet", *Neue Züricher Zeitung am Sonntag*, 27 September 2020.
- Taylor, Charles. *Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität*. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994.
- Verseck, Keno. "Orban wegen Notstandsgesetz in der Kritik." *Der Spiegel*, 8 Mai 2020. <<https://www.spiegel.de/politik/ausland/ungarn-viktor-orban-nutzt-offenbar-notstandsgesetz-aus-a-9bfa4127-9f98-4419-8f50-c0e45022ac52>>

